

RINGKASAN

**Tasya Wiraning Praja
(200510353)**

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Monumen Samudera Pasai
Aceh Utara)
(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H dan Dr. Budi
Bahreisy S.H., M.H.)**

Korupsi telah menjadi permasalahan yang meresahkan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang salah satunya ialah kasus korupsi yang terkait dengan proyek pembangunan Monumen Samudera Pasai. Penjatuhan putusan bebas ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan tentang sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi.

Tujuan pada penelitian ini ialah mengetahui dan menjelaskan faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi monumen samudera pasai dan bentuk dakwaan jaksa terhadap pelaku korupsi monumen samudera pasai.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui wawancara dengan subjek terkait meliputi narasumber, responden dan informan sebagai bahan utama.

Hasil dari penelitian ini, berdasarkan fakta-fakta yang di dapat baik dari keterangan saksi maupun terdakwa dilapangan dalam penanganan kasus pembangunan Monumen Samudera Pasai Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2012 maka diperoleh bahwa faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas diantaranya; pertama, kurangnya bukti yang mendukung dakwaan jaksa. Kedua, kesalahan prosedural dalam proses menyidikan sehingga mengarah tidak sah nya alat bukti yang diajukan ke persidangan. Ketiga, faktor interpretasi hukum oleh hakim Dalam penelitian ini, Dakwaan jaksa berfokus pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Adapun saran yang dapat diberikan ialah pentingnya untuk menganalisis keterkaitan peran dari setiap individu yang terlibat mengenai tanggung jawab masing-masing pihak sehingga dapat diperolehnya evaluasi mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan proyek publik sehingga dapat ditemukan titik fokus dalam analisis korupsi.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Pelaku Tindak Pidana, Korupsi.

SUMMARY

**TASYA WIRANING PRAJA
(200510353)**

**FREE DECISION AGAINST
PERPETRATOR OF THE
SAMUDERA PASAI MONUMENT
CORRUPTION CRIME (Research
Study in the Legal Area of the Banda
Aceh District Court)
(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H and
Dr. Budi Bahreisy S.H., M.H.)**

Corruption has become a troubling problem in many countries, including Indonesia, one of which is a corruption case related to the Samudera Pasai Monument construction project. This acquittal has raised various reactions and questions about the judicial system in handling corruption cases.

The purpose of this study is to determine and explain the factors that caused the judge to impose an acquittal verdict on the perpetrator of the corruption of the Samudera Pasai monument and the form of the prosecutor's indictment against the perpetrator of corruption of the Samudera Pasai monument.

This research uses empirical juridical methods with a case and statutory approach. The nature of this research is descriptive. The data collection technique used is through interviews with related subjects including sources, respondents and informants as the main material.

The results of this study, based on the facts obtained both from witness testimony and defendants in the field in the handling of the Samudera Pasai Monument construction case in North Aceh Regency in 2012, it was found that the factors that caused the judge to impose an acquittal decision included; first, the lack of evidence supporting the prosecutor's charges. Second, procedural errors in the investigation process that led to the invalidity of the evidence submitted to the trial. Third, the factor of legal interpretation by judges. In this study, the prosecutor's indictment focused on the abuse of authority, opportunity, or means available due to position or position, which resulted in state financial losses.

The suggestion that can be given is the importance of analyzing the role of each individual involved regarding the responsibilities of each party so that an evaluation of the supervision mechanism and transparency in the management of public projects can be obtained so that a focal point can be found in the analysis of corruption.

Keywords: Acquittal, Criminal, Corruption.